

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TUGAS AKHIR

ANALISIS EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN PERIODE 2015-2019 PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

*Disusun dan Dianjurkan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau*



Oleh :

DHEA REZKY ZULYANA
NIM. 01770423596

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : DHEA REZKY ZULYANA
NIM : 01770423596
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : ANALISIS EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PERIODE
 2015-2019 PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
 JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya, maka kami berpendapat bahwa laporan ini sudah dapat di setujui.

Pekanbaru, 11 MEI 2020
 DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING

Identiti, SE, M. Ak, Ak, CA
 NIP. 19690623 200901 2 004

MENGETAHUI,

DEKAN

KETUA JURUSAN

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
 NIP. 19741108 200003 2 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : DHEA REZKY ZULYANA
 NIM : 01770423596
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : **ANALISIS EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PERIODE
 2015-2019 PADA KANTOR WILAYAH
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 PROVINSI RIAU**

Tanggal Ujian : SELASA, 19 MEI 2020

PANITIA PENGUJI

KETUA PENGUJI

Dr. Dony Martias, SE, MM

NIP. 19760306 200710 1 004

PENGUJI I

Rimet, SE, MM, Ak, CA

NIK. 130 707 014

PENGUJI II

Dr. Nanda Suryadi, SE, ME

NIK. 130 717 055

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN PERIODE 2015-2019 PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

OLEH :

DHEA REZKY ZULYANA

01770423596

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. Tujuan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui tingkat evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan Periode 2015-2019, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu cara menganalisa dengan membandingkan data yang sudah ada dengan teori yang sudah diperoleh. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Pelalawan pada Periode 2015-2019 dilihat dari (1) Rasio kemandirian daerah diantara 0%-25% masih tergolong sangat rendah dan dalam kategori pola hubungan instruktif, (2) Rasio derajat desentralisasi dapat dikategorikan tidak baik, (3) Rasio efektivitas dikategorikan cukup efektif (4) Rasio keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengalokasikan lebih dominan pada belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal.

Kata kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti sekarang ini.

Puji syukur atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul: ***“ANALISIS EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN PERIODE 2015-2019 PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU”***. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menyelaikan studi Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis banyak sekali mendapatkan perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi, serta masukan-masukan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyamaikan rasa Terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua penulis Ayahanda Zulfahmi dan Ibunda Desiana Yazid, yang senantiasa memberikan Do'a restunya, motivasi, dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof, Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau beserta Staf Rektor.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau beserta Pembantu Dekan I, II dan III.
4. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan D-III Akuntansi, yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak. CA, selaku Sekretaris Jurusan D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
6. Ibu Identiti, SE, M.Ak, Ak CA, selaku dosen pembimbing dalam penulisan tugas akhir ini, yang senantiasa meluangkan waktu, ilmu, motivasi serta dorongan dan masukannya kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak, selaku Pembimbing Akademis, yang senantiasa memberikan bimbingan pada bidang akademis selama perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang senantiasa memberikan banyak Ilmu kepada penulis.
9. Bapak Hasan Fauzi, S.S.T. Ak., M.S.Ak, Mbak Rini Apriani, A.Md. Ak, Ibu Syarifah dan seluruh Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, yang senantiasa membantu kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat mengumpulkan data yang diperlukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada adik penulis, Dwifa Rezky Muharani yang senantiasa memberikan dukungan serta mengirim doa sehingga selesainya tugas akhir ini.
11. Seluruh Kepada Keluarga Besar Yazid Hamta dan Suarni yang senantiasa memberikan dukangan serta mengirim doa sehingga selesainya tugas akhir ini.
12. Sahabat seperjuangan Putri Sundary, Chelsi, Dianah, Vegi, Waras, Shadri, Rengki, Indah, Rafiqa, Selli, Dayat, Andhika, Mawan, Taufik, Agustina, Agnes, Ocha dan seluruh mahasiswa/I Jurusan D-III Akuntansi angkatan 2017 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.
13. Kepada Sahabat Penulis Keluarga Papa Tedjo, Prity Yolanda, Eva Meldiana, Mutia Saleha, Irma Ikromul, Ratih Fauziah dan Fahri Muhammad yang senantiasa memberikan dukungan serta mengirim doa sehingga selesainya tugas akhir ini.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Tugas Akhir selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 19 Mei 2020

UIN SUSKA RIAU

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.5 Metode Pengumpulan Data.....	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	12
2.1 Sejarah Umum Kanwil DJPB Provinsi Riau	12
2.2 Visi dan Misi Kanwil DJPB Provinsi Riau	14
2.3 Struktur Organisasi Kanwil DJPB Provinsi Riau	15
2.4 Tugas dan Wewenang Kanwil DJPB Provinsi Riau	17
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	27
1 Tinjauan Teori	27
3.1.1 Pengertian Keuangan Daerah	27
3.1.2 Pengertian Anggaran.....	29
3.1.3 Penganggaran Sektor Publik.....	30
3.1.4 Pengertian Anggaran Pendapatan Daerah.....	31
3.1.5 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.6 Pengertian Evaluasi.....	54
3.1.7 Anggaran Dalam Pandangan Islam.....	56
2. Tinjauan Praktek	59
3.2.1 Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pelalawan.....	60
3.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemda	80
3.2.3 Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Pada Kanwil Djpb	81
BAB IV PENUTUP	84
4. 1 Kesimpulan	84
4. 2 Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1.1	Gambar Realisasi Pendapatan Daerah Kab.Pelalawan T.A 2015-2019.....	5
2.1	Gambar Srtuktur Organisasi Kanwil DJPB Provinsi Riau.....	13
3.1	Gambar Grafik Rasio Kemandirian Pemerintah Kab. Pelalawan	62
3.2	Gambar Grafik Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kab. Pelalawan	67
3.3	Gambar Grafik Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kab. Pelalawan.....	71
3.4	Gambar Grafik Rasio Belanja Operasi thdp Belanja Daerah Kab. Pelalawan	75
3.5	Gambar Grafik Rasio Belanja Modal thdp Belanja Daerah Kab. Pelalawan	78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

3.1	Tabel Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	48
3.2	Tabel Derajat Desentralisasi Fiskal	50
3.3	Tabel Kriteria Pengukuran Efektivitas.....	51
3.4	Tabel Kriteria Pengukuran Efisiensi	52
3.5	Tabel Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Pelalawan.....	62
3.6	Tabel Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kab. Pelalawan	67
3.7	Tabel Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Pelalawan	71
3.8	Tabel Rasio Belanja Operasi thdp Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan	75
3.9	Tabel Rasio Belanja Modal thdp Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan .	78

DAFTAR LAMPIRAN

- 1.1 Lampiran Wawancara
- 1.2 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pelalawan Tahun 2015
- 1.3 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pelalawan Tahun 2016
- 1.4 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pelalawan Tahun 2017
- 1.5 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pelalawan Tahun 2018
- 1.6 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelola keuangan daerah yang baik akan membuat asset daerah terjaga keutuhannya. Menurut **(Afiah, 2010:23)** Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pemerintah dituntut untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah secara baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik dengan menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (**PP 12 tahun 2019, pasal 3**). Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (**Halim, 2012:212**).

Salah satu cara menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio



keuangan diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian (**Halim, 2012:230**).

Menurut (**Halim, 2012:221-234**) dinyatakan bahwa Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal.

Rasio desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (**Mahmudi, 2019:140**).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pendapatan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dan untuk rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (**Mardiasmo, 2013:112**).

Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBN adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara bertugas untuk mendorong percepatan realisasi penyerapan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga dalam mencapai sasaran program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab. Sebagai identifikasi awal, rendahnya penyerapan anggaran mengindikasikan adanya permasalahan baik dari sisi teknis maupun regulasi. Hal ini menjadi landasan akan perlunya kegiatan *monitoring* dan evaluasi penyerapan anggaran sehingga dapat diketahui permasalahannya serta sekaligus mampu memberikan rekomendasi untuk mengatasi setiap hambatan yang dihadapi dan dapat diketahui pencapaian hasil, kemajuan dan guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan yang akan datang.

Faktor yang mendukung penulis melakukan penelitian mengenai Analisis Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015-2019 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau karena peneliti ingin mengetahui hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Kanwil DJPB terhadap Pelaksanaan Anggaran di Kabupaten Pelalawan yang mana dari hasil analisis yang dilakukan bahwa kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim

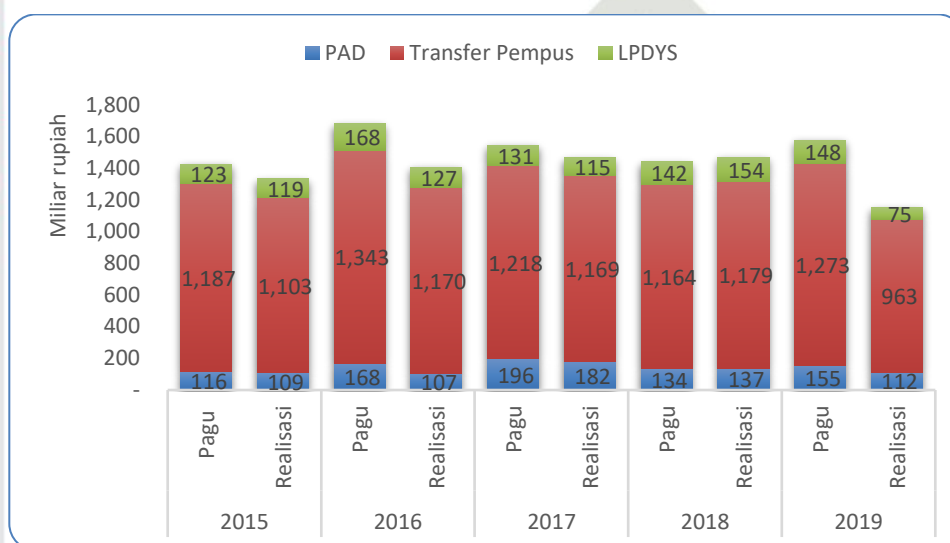
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelalawan masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat karena kemandirian daerah masih rendah. Dapat dilihat dalam tabel berikut :

Gambar 1.1

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

T.A 2015-2019



Sumber : Data diolah (2020)

Dapat dilihat dari tabel 1.1 untuk realisasi pendapatan daerah kabupaten Pelalawan bahwa rata-rata pendapatan pada APBD Kabupaten Pelalawan didominasi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aftar, Kasmadi dan Syamsul (2017) melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten Pelalawan pada periode 2013-2014 menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktifitas dan rasio pertumbuhan pendapatan. Hasil penelitian ini adalah hasil analisis rasio keuangan daerah untuk



tahun 2013-2014 mengalami penurunan. Di lihat dari rasio kemandirian Kabupaten Pelalawan mengalami peningkatan tapi masih termasuk dalam kategori rendah, untuk rasio efektifitas Kabupaten Pelalawan terbilang efektif walau mengalami penurunan, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien Namun, Tingkat pertumbuhan pendapatannya dinyatakan positif, karena selalu mengalami peningkatan pendapatan.

Dengan adanya pengukuran, analisis, dan evaluasi terhadap data yang berkaitan dengan kinerja, pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian hasil yang diperoleh.

Penelitian ini memberikan gambaran kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan selama tahun 2015-2019 yang digunakan untuk mengambil kesimpulan terkait Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan selama kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat satu karya ilmiah berbentuk tugas akhir dengan judul **“ANALISIS EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2015-2019 PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat membuat perumusan masalah penelitian, yaitu “Bagaimana Tingkat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Periode 2015-2019 dengan menggunakan analisis rasio keuangan?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan pada periode 2015-2019 dengan menggunakan analisis rasio keuangan untuk bahan evaluasi pelaksanaan anggaran.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang membutuhkannya, antara lain ada sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai wadah untuk menerapkan teori-teori serta mengembangkan apa yang telah diperoleh dari bangku kuliah. Untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan pada periode 2015-2019 dengan menggunakan rasio keuangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1.4.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebagai organisasi sektor public dalam melakukan pengukuran kinerja agar lebih komprehensif sehingga mampu mencerminkan seluruh aspek baik finansial maupun non finansial supaya daerah tersebut menjadi lebih baik dan maju dimasa yang akan datang dan juga dapat dijadikan alternative masukan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui akuntabilitas kinerja pemerintahan.

3. Bagi Instansi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penilaian Kinerja Keuangan instansi dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk masalah keuangan yang dihadapi.

4. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil ini dapat dijadikan pengetahuan dan sebagai bahan perbandingan atau referensi dalam penelitian berikutnya.

1.4.1 Metode Penelitian

1.4.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 249 Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian dimulai dari bulan Maret 2020 s.d April 2020.

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini berupa :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau dalam bentuk sudah jadi yang diperoleh dari pimpinan dan pihak lain-lain intern dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. Data tersebut berupa wawancara mendalam dan observasi tentang Analisis Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan pada kanwil Perbendaharaan.

1) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dan disajikan oleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau yang sudah jadi seperti sejarah umum dan struktur organisasi, deskripsi jabatan dan pembagian masing-masing tugas dan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dapat dibedakan atas 3 bagian.

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai karyawan kantor dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir.
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulam data dengan mengutip data secara langsung yang dimiliki oleh dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pelalawan, Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Anggaran, dan Kajian Fiskal Regional Provinsi Riau.
3. Penelitian pustaka merupakan pengumpulan data dengan mengadakan pengumpulan data, pembahasan yang diambil dari literatur-literatur bantuan studi dan sumber lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Laporan ini penulis menggunakan sistem penulisan yang terbagi dalam 4 bab yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini membahas gambaran umum mengenai keadaan perusahaan seperti sejarah dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau yaitu sejarah instansi, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan wewenang dan uraian tugas struktural instansi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini menguraikan teori yang terkait dengan judul penelitian yang penulis bahas seperti pengertian keuangan daerah, pengertian anggaran, penganggaran sektor publik, anggaran pendapatan belanja daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah, evaluasi dan anggaran dalam pandangan islam dan tinjauan praktek yang terjadi diinstansi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan yang dirangkum dari hasil penelitian dan saran yang diajukan bagi intansi sebagai upaya untuk menunjang kemajuan intansi dimasa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut Kanwil DJPBN Provinsi Riau, didirikan pada bulan April 1999 bergabung atau dibawah oleh Kanwil Sumatera Barat. Sebelumnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini bernama Kanwil IV. Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan negara di Indonesia. Ketika semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. Secara paralel, reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya Paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan perubahan organisasional di tubuh Kementerian Keuangan guna menelaraskan perangkat organisasi dengan penegasan fungsi Kementerian keuangan selaku institusi pengelola fiskal.

Selaku institusi pengelola fiskal, Kementerian Keuangan membagi pemisahan kewenangan, yang antara lain adalah fungsi-fungsi pengkajian, penganggaran, dan perbendaharaan. Inilah alasan kuat terjadinya penyempurnaan organisasi (reorganisasi) dengan terbentuknya 3 (tiga) organisasi dengan nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Perimbangan Keuangan (Ditjen APK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan), dan badan Pengkajian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama Internasional (BAPEKKI). Suatu perubahan organisasi yang ditandai dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda namun berada dalam suatu naungan organisasi, serta menyatukan fungsi-fungsi yang sama tersebar di berbagai unit.

Ditjen Perbendaharaan sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. Fungsi utamanya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan fungsi paling dominan, yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, pengelolaan barang milik kekayaan negara, dan pengelolaan hutang luar negeri yang berada di bawah unit eselon I DJA. Sementara itu, fungsi perbendaharaan lainnya tersebar di beberapa unit Eselon I dan Eselon II yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON), pengelolaan penerusan pinjaman dan pengelolaan kasnya pada Ditjen Lembaga Keuangan (Ditjen LK), dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), serta fungsi pengolahan data pada Kantor Pengolahan Data Informasi Keuangan Regional (KPDIKR) BINTEK.

Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburlah unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 Sekretariat Ditjen dan 7 Direktorat Teknis pada kantor pusat serta 33 Kanwil DJPBN dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada kantor instansi vertikal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelantikan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh pejabat Eselon II pada bulan Oktober 2004 pun menjadi titik awal sinergi organisasi baru tersebut. Hingga kini, telah terjadi beberapa kali pergantian pejabat Eselon II dan jajaran di bawahnya. Selanjutnya, dengan diterbitkannya peraturan menteri keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Wilayah Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPBN mempunyai tugas dan fungsi baru dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

1. Visi

“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia” (*To be a world-class state treasury manager*).

2. Misi

- a. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang prudent, efisien, dan optimal (*To achieve prudent, efficient, and optimum cash dan fund investment management*).
- b. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel (*To support timely, effective, and accountable budget execution*).



- c. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu (*To achieve accountable, transparent, and timely state finance accounting and reporting*).
- d. Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang handal, profesional, dan modern (*To develop reliable, professional, and modern treasury support system*).

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka atau bagian yang penggarisan atau penetapan tugas, tanggung jawab dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang berada didalam organisasi tersebut. Dari struktur organisasi terlihat pembagian dan pendistribusian tugas dari atau setiap orang yang didalamnya secara tegas dan jelas. Sehingga administrasi dan manajemen mempunyai peran dominan di dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau berbentuk staff dan lini.

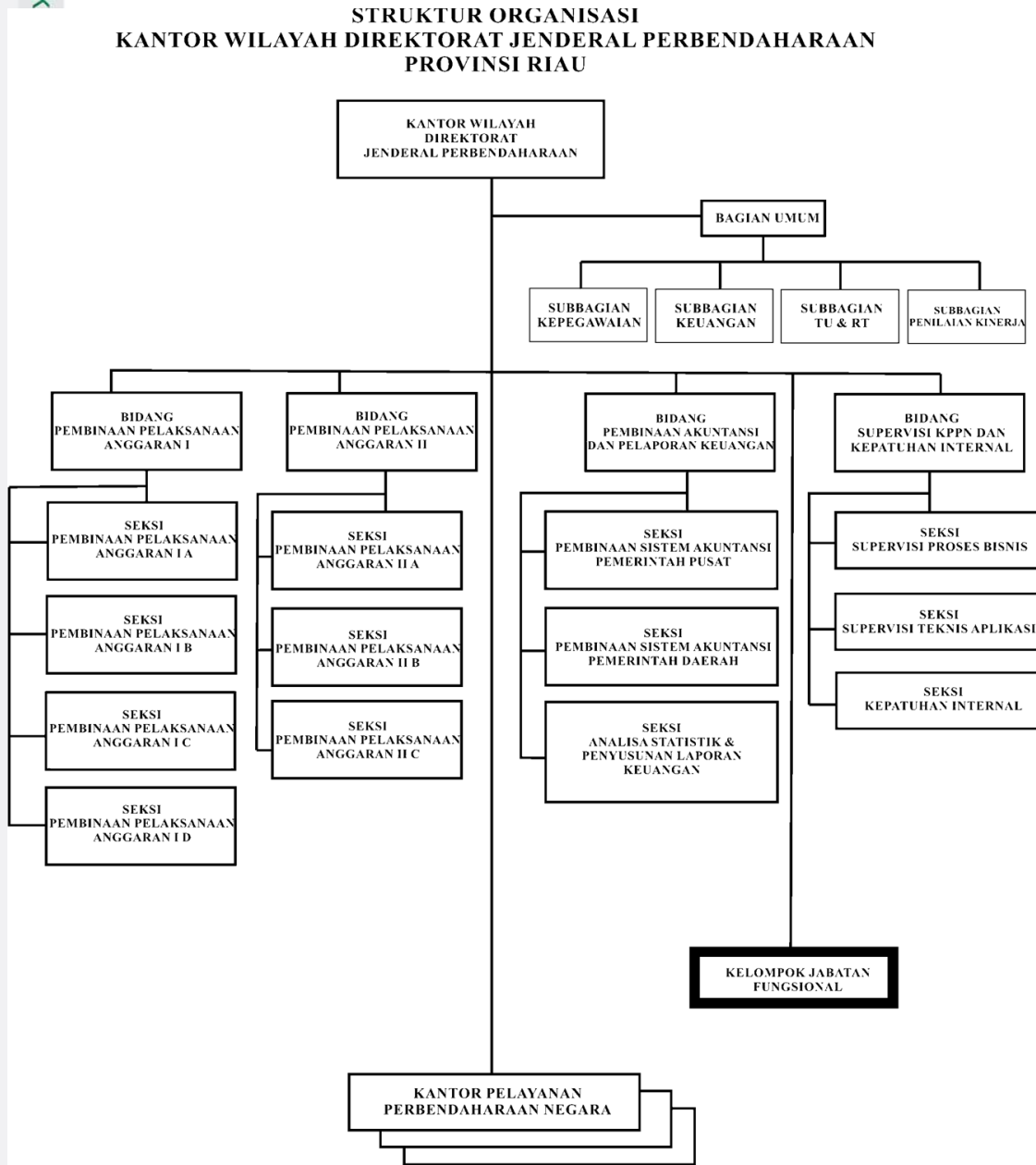
Struktur organisasi ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain karena menunjukkan tingkat perintah dari atasan kepada bawasanya dan tingkat tanggungjawab dari bawahan ke atasannya. Struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau berikut ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kanwil DJPB Provinsi Riau



Sumber : Kanwil DJPB Provinsi Riau

Library of Sultan Syarif Kasim

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Tugas dan Wewenang

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau dipimpin oleh kepala kantor dan dibantu oleh bagian umum dan seluruh bidang. Untuk lebih rincinya tugas dan wewenang masing-masing dari struktur organisasi Kanwil Dirjen Perbendaharaan terdiri atas:

1. Kepala kantor

Pemimpin serta penanggung jawab, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua bidang supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam tercapainya tujuan kerja.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, dukungan sarana dan prasarana kerja, urusan kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PSDM), keuangan, tata usaha, rumah tangga dan kehumasan, keterbukaan informasi publik (KIP), protokoler pimpinan, dan pengelolaan kinerja. Bagian Umum memiliki beberapa subbagian yaitu:

a. Subbagian Kepegawaian

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan pegawai, dan pengembangan sumber daya manusia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Subbagian keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan RKA-KL, urusan kebendaharaan, pengujian SPP dan penerbitan surat perintah membayar, akuntansi dan pelaporan keuangan.

c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan laporan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, pembuatan komitmen, pengujian tagihan, pengajuan permintaan pembayaran, perlengkapan dan rumah tangga, urusan tata usaha, kehumasan, protokoler pimpinan, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik serta kompilasi dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.

d. Subbagian Penilaian Kinerja

Subbagian Penilaian Kinerja mempunyai tugas melakukan pengelolaan kinerja yang meliputi penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja, pemantauan, penilaian, evaluasi dan pelaporan kinerja.

3. Bidang Pembina Pelaksanaan Anggaran I

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A, I B, I C, dan I D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengesahan revisi DIPA, pembinaan dan pembimbing teknis penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat, pengelolaan keuangan BLU dan manajemen investasi, dan monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran dan pelaksanaan



anggaran pemerintah pusat, serta penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja pemerintah pusat yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal.

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring pengelolaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah, koordinasi pemantauan realisasi penggunaan dana transfer, dan fasilitas penyampaian informasi keuangan daerah, serta penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja daerah. Dalam melaksanakan tugas pembinaan. Bidang pembinaan pelaksanaan anggaran seksi I menyelenggarakan fungsi:

- a. Kompilasi dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dokumen pelaksanaan anggaran daerah.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah.
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran belanja daerah.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengelolaan kas daerah.
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BLU daerah.
- f. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis manajemen dan monitoring dan evaluasi investasi daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Penyiapan bahan monitoring pelaksanaan anggaran belanja dan pemantauan atas penerimaan dana transfer di daerah dalam rangka *Spending Revie*.
- h. Koordinasi pemantauan laporan realisasi penggunaan dana transfer.
- i. Fasilitas penyiapan informasi keuangan daerah, dan
- j. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja daerah.

4. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran daerah, investasi pemerintah, pinjaman, kredit program, dana transfer, dan pelaksanaan anggaran daerah, serta melaksanakan Kajian Fiskal Regional, analisis kinerja anggaran belanja daerah, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah, serta layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan Kajian Fiskal Regional;
- b. Penyiapan bahan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran daerah;
- c. Penyiapan bahan asistensi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi atas investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program di daerah;
- e. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi dana transfer di daerah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah;
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran daerah;
- h. Pengoordinasian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah; dan
- i. Pengoordinasian pelaksanaan layanan Kementerian Keuangan di daerah.

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A
- b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B
- c. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C

Seksi Pembinaan Pelaksanaan anggaran II A, II B, dan II C masing-masing mempunyai tugas melakukan penyusunan Kajian Fiskal Regional, melakukan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran belanja daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pelaksanaan anggaran belanja daerah, investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program, melakukan monitoring dan evaluasi dana transfer, investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program, melakukan koordinasi pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah, serta melakukan analisi



dan penyusunan laporan pembinaan pelaksanaan anggaran daerah yang pembagian tugasnya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

5. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan keuangan

Bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, rekonsiliasi, monitoring, dan evaluasi, penyusunan koordinasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman umum sistem akuntansi pemerintah (PUSAP), dan penyusunan statistik keuangan sesuai dengan *Government Finance Statistics* (GFS), serta analisa atau laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah pusat.
- b. Meyiapkan bahan bimbingan teknis atau penyuluhan implikasi standar akuntansi pemerintah pada instansi.
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah daerah.
- d. Penyiapan bahan bimbingan teknis atau penyuluhan implementasi standar akuntansi pemerintah pada instansi daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penyelenggaraan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat unit akuntansi pembantu penggunaan anggaran wilayah (UAPPA-W).
- f. Konsolidasi LKPP tingkat unit akuntansi pembantu penggunaan anggaran wilayah (UAPPA-W).
- g. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyusunan LKPP tingkat kuasa BUN.
- h. Penyiapan bahan penyusunan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman umum sistem akuntansi pemerintah (GFS), dan
- i. Penyiapan bahan analisis atas laporan keuangan.

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memiliki beberapa seksi, yaitu:

- a. Seksi Pembinaan System Akuntansi Pemerintah Pusat

Seksi pembinaan system akuntansi pemerintah pusat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis system akuntansi, melakukan bimbingan teknis atau penyuluhan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi pusat.

- b. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Seksi pembinaan sistem akuntansi pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis system akuntansi, melakukan bimbingan teknis atau penyuluhan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Seksi Analisis, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan

Seksi analisis, statistik, dan penyusunan laporan keuangan mempunyai tugas melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah, penyusunan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi penyusunan LKPP Tingkat kuasa BUN, penyusunan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman umum system akuntansi pemerintah (PUSAP), dan menyusun statistik keuangan pemerintah sesuai dengan *Government Finance Statistics*, serta analisis atau laporan keuangan.

6. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal

Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan proses bisnis supervisi, implementasi, dan bimbingan teknis orasional aplikasi pada KPPN penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang supervisi KPPN dan kepatuhan internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas kuasa bendahara umum negara pada KPPN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan perbendaharaan
- c. Penyiapan bahan penilaian kinerja kppn
- d. Monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN
- e. Penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur operasi aplikasi SPAN dan SAKTI
- f. Penyiapan bahan bimbingan teknis operasional aplikasi SPAN dan SAKTI
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan kantor wilayah
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor wilayah

Adapun beberapa seksi di Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal yaitu:

- a. Seksi Supervisi Proses Bisnis

Seksi supervisi proses bisnis mempunyai tugas melakukan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas kuasa BUN pada KPPN, pelayanan perbendaharaan dan penilaian kinerja KPPN serta monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN.

b. Seksi Supervisi Teknis

Seksi supervisi teknis aplikasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, supervisi, implementasi, bimbingan teknis operasionalisasi, dan monitoring standarisasi infrastruktur aplikasi pada KPPN.

c. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengaduan, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta menyiapkan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan laporan hasil penindakan kepatuhan internal KPPN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan berdasarkan penelitian yang di ukur melalui rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, dan meningkatkan belanja daerah.
2. Rasio kemandirian yang masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang mampunya Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan Pemerintah Kabupaten Pelalawan bergantung dengan pemerintah pusat. Rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Pelalawan masuk dalam kategori hubungan instuktif yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan terhadap kemandirian pemerintah daerah.
3. Rasio Desentralisasi juga menunjukkan kriteria tidak baik hal ini menunjukkan bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung kecil. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menompang pendapatan daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten pelalawan dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi.
5. Rasio Efektivitas Kabupaten Pelalawan termasuk dalam Kriteria Cukup Efektif yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan cukup mampu dalam mencapai target untuk pendapatan daerah tersebut.
6. Rasio Keserasian Kabupaten Pelalawan lebih dominan dialokasikan pada belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal/pembangunanan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Pelalawan lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir.
2. Pemerintah Kabupaten Pelalawan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar

dan tepat waktu sehingga memudahkan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar lebih rinci lagi dalam penyusunan laporan pembinaan pelaksanaan anggaran.
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melakukan penambahan waktu dalam penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 188
- Al Qur'an Surah Al-An'am Ayat 38
- Al Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 18
- Ahmad, Nunuy Nur. 2010. *Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Arifunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bisma, I Dewa GGde, dan Hery Susanto. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Ganec Swara Edisi Khusus. Vol. 4 No. 3
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haibie, Muhammad Aftar dkk. 2017. Analisis kinerja keuangan pada pemerintah daerah 2013-2014. Jurusan Studi Akuntansi STIE Bangkinang.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mansun, Moh., Firman Sulistyowati & Heribertus Andre Purwanugraha. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo, 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Mulyono dan Yumari. 2017. *Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran*. Sleman: DEEPUBLISH.

Menteri Dalam Negeri. 2019. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menteri Dalam Negeri. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menteri Dalam Negeri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Menteri Keuangan. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195 / PMK.05/ tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Masdiantini, Putu Riesty dan Ni Made Adi Erawati. 2016. *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 1150-1182.

Nekholis, dan Moh Khusaini. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pahiyati, Ranti. 2010. "Analisis faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Putri, Kemala Dewi Lubis. 2017. *Analysis Of The Effectiveness of Tax Billing using A Letter Of Reprimand In Increasing The Acceptance Of Income Tax Year 2011-2014 Agency (Study On Taxation Service Offices Pratama Medan East)*. International Journal Of Scientific & Technology Research. Volume 6 No. 6
- Ratebalik, Bonilisa dkk. 2016. *Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja*. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Volume 9 No.2
- Sularso, Haviddan Yunuar E Restianto. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah*. Media Riset Ekonomi Purwokerto.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN WAWANCARA

Lampiran 1 : Lembar Panduan Wawancara

**“ Analisis Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Periode 2015-2019 pada Kantor Wilayah
Perbendaharaan Provinsi Riau “**

Informan : Hasan Fauzi, S.S.T. M.S.Ak

Jabatan : Kepala Seksi B bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Tempat : Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

Tanggal : 10 Maret 2020

Waktu : 14.30

1. Bagaimanakah Prosedur Analisis dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pemerintah daerah ?

Jawaban : Prosedur Analisis dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran dapat di lihat dalam PMK Nomor 195/PMK.05/2018

2. Apakah sajakah bahan yang perlu dipersiapkan dalam melakukan Analisis dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran oleh Kanwil DJPB?

Jawaban : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, PMK 195 dan Per 34 Pb 2018 tentang tata cara laporan hasil pembinaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyusunan Laporan hasil analisis dan evaluasi p Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pemerintah daerah ini dilakukan berdasarkan triwulan, semesteran atau tahunan?

Jawaban : Semesteran

4. Apakah faktor penyebab rendahnya pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut ?

Jawaban :

- keterbatasan kinerja SDM yang kurang kompeten dalam mengelola APBD yang di Kabupaten Pelalawan
- Rendahnya Kesadaran Masyarakat Pelalawan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
- Pemda Kabupaten Pelalawan harus melakukan penyuluhan kepada subjek Pajak dan Retribusi daerah kepada masyarakat luas terutama kepada aparat desa, tokoh masyarakat dan pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Pelalawan dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak



LAMPIRAN DATA

11 Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	Catatan	Anggaran Setelah Perubahan 2015	Realisasi 2015	Realisasi 2014
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	4.4.1			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1	34.139.000.000,00	28.927.442.365,96	25.752.046.332,88
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.2	4.393.000.000,00	4.682.978.134,00	7.933.600.046,00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.3	15.710.504.830,00	16.449.422.754,97	13.807.886.973,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	5.1.4	61.482.327.658,00	59.025.250.557,94	38.785.313.456,07
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		115.724.832.488,00	109.085.093.812,87	86.278.846.807,95
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.5	206.879.181.000,00	160.259.263.900,00	147.968.377.638,00
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.6	266.515.217.727,00	211.879.221.677,00	520.194.518.331,00
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	5.1.7	518.942.022.000,00	518.942.022.000,00	536.384.455.000,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	5.1.8	81.008.490.000,00	78.340.457.000,00	13.974.540.000,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN		1.073.344.910.727,00	969.420.964.577,00	1.218.521.890.969,00
1.2.2.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
1.2.2.1.	Dana Penyesuaian	5.1.9	113.374.072.000,00	113.374.072.000,00	53.620.082.000,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		113.374.072.000,00	113.374.072.000,00	53.620.082.000,00
1.2.3.	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA				
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.10	107.528.923.557,00	109.075.678.445,89	119.455.170.331,51
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA		107.528.923.557,00	109.075.678.445,89	119.455.170.331,51
1.2.4.	BANTUAN KEUANGAN				
1.2.4.1.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.1.11	15.692.000.000,00	10.347.525.000,00	7.531.200.000,00
	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		15.692.000.000,00	10.347.525.000,00	7.531.200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.309.939.906.284,00	1.202.218.240.022,89	1.399.128.343.300,51
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
1.3.1.	Pendapatan Hibah		-	-	-
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN		1.425.664.738.772,00	1.311.303.333.835,76	1.485.407.190.108,46
2	BELANJA	4.4.2			
2.1.	BELANJA OPERASI				
2.1.1.	Belanja Pegawai	5.1.12	551.588.759.641,67	496.761.145.699,89	599.458.682.760,75
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.1.13	605.106.643.551,76	520.296.631.583,58	385.480.839.631,28
2.1.3.	Belanja Hibah	5.1.14	67.535.108.500,00	54.487.249.325,00	29.480.170.000,00
2.1.4.	Bantuan Sosial	5.1.15	25.914.910.000,00	9.975.690.000,00	18.790.245.000,00
2.1.5.	Bantuan Keuangan	5.1.16	-	-	652.409.982,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI		1.250.145.421.693,43	1.081.520.716.608,47	1.033.862.347.574,03
2.2.	BELANJA MODAL				
2.2.1.	Belanja Tanah	5.1.17	162.961.715.587,00	64.205.739,00	3.091.106.872,69
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.18	72.223.436.141,83	61.487.334.612,96	63.310.061.366,38
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.19	106.866.949.704,89	93.972.203.826,45	63.338.362.454,44
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.20	346.811.522.672,35	297.596.718.940,47	195.135.680.520,27
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.21	557.300.000,00	464.442.194,00	2.602.379.958,50
	JUMLAH BELANJA MODAL		689.420.924.106,07	453.584.905.312,88	327.477.591.172,28
2.3.	BELANJA TAK TERDUGA				
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	5.1.22	1.500.000.000,00	20.094.994,00	798.814.000,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		1.500.000.000,00	20.094.994,00	798.814.000,00

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014
 (Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	Catatan	Anggaran Setelah Perubahan 2015	Realisasi 2015	Realisasi 2014
1	2	3	4	5	6
2.4.	TRANSFER	4.4.3			
2.4.1.	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN				
2.4.1.1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.23	150.000.000,00	-	23.000.000,00
	JUMLAH TRANSFER BAGI HASILPENDAPATAN		150.000.000,00	-	23.000.000,00
2.4.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
2.4.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.24	148.947.340.000,00	148.067.340.000,00	111.765.988.400,00
2.4.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik	5.1.25	1.091.218.554,00	970.986.582,00	-
	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		150.038.558.554,00	149.038.326.582,00	111.765.988.400,00
	JUMLAH TRANSFER		150.188.558.554,00	149.038.326.582,00	111.788.988.400,00
	JUMLAH BELANJA		2.091.254.904.353,50	1.684.164.043.497,35	1.473.927.741.146,31
	SURPLUS/DEFISIT (Total Pendapatan-Total Belanja)		(665.590.165.581,50)	(372.860.709.661,59)	11.479.448.962,15
3	PEMBIAYAAN	4.4.4			
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3.1.1.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	5.1.26	664.868.618.487,53	664.868.618.487,53	652.227.976.154,41
3.1.2.	Hasil Penerimaan Dividen Tunai	5.1.27	721.547.093,97	-	1.050.321.370,97
3.1.3.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	5.1.28	-	43.360.000,00	110.872.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		665.590.165.581,50	664.911.978.487,53	653.389.169.525,38
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		-	-	-
3.3.	PEMBIAYAAN BERSIH		665.590.165.581,50	664.911.978.487,53	653.389.169.525,38
4	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	5.1.29	-	292.051.268.825,94	664.868.618.487,53

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan


BUPATI PELALAWAN
H.M.HARRIS



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.2 Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

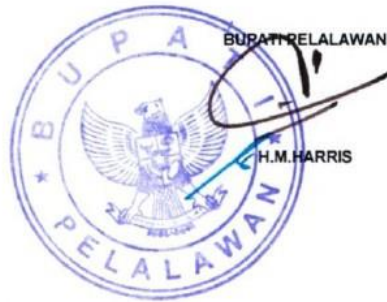
No	URAIAN	Catatan	Anggaran Setelah Perubahan 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN	4.4.1				
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1	80.161.500.000,00	35.812.150.389,71	44,68%	28.927.442.365,96
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.2	15.291.000.000,00	10.091.113.747,00	65,99%	4.682.978.134,00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.3	15.205.950.786,00	6.778.898.054,48	44,58%	16.449.422.754,97
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.4	57.428.129.500,00	54.395.789.769,39	94,72%	59.025.250.557,94
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		168.086.580.286,00	107.077.951.960,58	63,70%	109.085.093.812,87
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER					
1.2.1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.5	144.357.868.000,00	149.760.740.874,00	103,74%	160.259.263.900,00
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.6	326.144.542.000,00	207.505.027.264,00	63,62%	211.879.221.677,00
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	5.1.7	596.801.161.000,00	596.801.161.000,00	100,00%	518.942.022.000,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	5.1.8	204.448.468.000,00	145.011.290.567,00	70,93%	78.340.457.000,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN		1.271.752.039.000,00	1.099.078.219.705,00	86,42%	969.420.964.577,00
1.2.2.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
1.2.2.1.	Dana Penyesuaian	5.1.9	71.400.280.000,00	71.400.280.000,00	100,00%	113.374.072.000,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA		71.400.280.000,00	71.400.280.000,00	100,00%	113.374.072.000,00
1.2.3.	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA					
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.10	117.218.974.439,00	96.084.898.713,61	81,97%	109.075.678.445,89
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA		117.218.974.439,00	96.084.898.713,61	81,97%	109.075.678.445,89
1.2.4.	BANTUAN KEUANGAN					
1.2.4.1.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5.1.11	50.650.439.808,00	31.121.265.700,52	61,44%	10.347.525.000,00
	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		50.650.439.808,00	31.121.265.700,52	61,44%	10.347.525.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.511.021.733.247,00	1.297.684.664.119,13	85,88%	1.202.218.240.022,89
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
1.3.1.	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00%	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		0,00	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL PENDAPATAN		1.679.108.313.533,00	1.404.762.616.079,71	83,66%	1.311.303.333.835,76
2.	BELANJA	4.4.2				
2.1.	BELANJA OPERASI					
2.1.1.	Belanja Pegawai	5.1.12	595.471.233.244,07	542.776.821.927,81	91,15%	496.761.145.699,89
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.1.13	507.237.414.921,53	466.362.846.263,48	91,94%	520.296.631.583,58
2.1.3.	Belanja Hibah	5.1.14	19.183.200.000,00	18.049.412.500,00	94,09%	54.487.249.325,00
2.1.4.	Bantuan Sosial	5.1.15	11.258.500.000,00	6.150.750.000,00	54,63%	9.975.690.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI		1.133.150.348.165,60	1.033.339.830.691,29	91,19%	1.081.520.716.608,47
2.2.	BELANJA MODAL					
2.2.1.	Belanja Tanah	5.1.16	182.611.083.888,00	142.857.100,00	0,08%	64.205.739,00
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.17	61.518.922.259,00	45.410.744.308,75	73,82%	61.487.334.612,96
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.18	115.071.835.525,70	105.001.750.997,66	91,25%	93.972.203.826,45
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.19	326.069.243.966,64	303.352.096.100,91	93,03%	297.596.718.940,47
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.20	796.650.000,00	776.680.500,00	97,49%	464.442.194,00
	JUMLAH BELANJA MODAL		686.067.735.639,34	454.684.129.007,32	66,27%	453.584.905.312,88
2.3.	BELANJA TAK TERDUGA					
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	5.1.21	750.000.000,00	0,00	0,00%	20.094.994,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		750.000.000,00	0,00	0,00%	20.094.994,00
2.4.	TRANSFER	4.4.3				
2.4.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
2.4.2.1.	Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.22	150.100.280.000,00	150.100.280.000,00	100,00%	148.067.340.000,00
2.4.2.2.	Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik	5.1.23	1.091.218.554,00	1.009.254.546,00	92,49%	970.986.582,00
	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		151.191.498.554,00	151.109.534.546,00	99,95%	149.038.326.582,00
	JUMLAH TRANSFER		151.191.498.554,00	151.109.534.546,00	99,95%	149.038.326.582,00
	JUMLAH BELANJA + TRANSFER		1.971.159.582.358,94	1.639.133.494.244,61	83,16%	1.684.164.043.497,35

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

No	URAIAN	Catatan	Anggaran Setelah Perubahan 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS/DEFISIT		-292.051.268.825,94	-234.370.878.164,90	80,25%	-372.860.709.661,59
3	PEMBIAYAAN	4.4.4				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.1.1.	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	5.1.24	292.051.268.825,94	292.051.268.825,94	100,00%	664.868.618.487,53
3.1.2.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	5.1.25	0,00	130.275.000,00	100,00%	43.360.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		292.051.268.825,94	292.181.543.825,94	100,04%	664.911.978.487,53
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2.2.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00	0,00%	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00%	0,00
3.3.	PEMBIAYAAN BERSIH		292.051.268.825,94	292.181.543.825,94	100,04%	664.911.978.487,53
4	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.26	0,00	57.810.665.661,04		292.051.268.825,94



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.3 Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

No	URAIAN	Catatan	Anggaran Setelah Perubahan 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	4.4.1				
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1	66.090.250.000,00	59.549.583.871,46	90,10%	35.812.150.389,71
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.2	13.782.224.000,00	9.152.961.577,00	66,41%	10.091.113.747,00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.3	11.756.674.602,00	11.262.105.502,00	95,77%	6.778.898.054,48
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.4	104.243.722.190,41	101.843.946.438,24	97,70%	54.395.789.769,39
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		195.875.870.692,41	181.808.597.388,70	92,82%	107.077.951.960,58
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER					
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.5	132.979.263.269,00	112.262.098.776,00	84,42%	149.760.740.874,00
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.6	205.454.417.999,00	216.521.967.002,00	105,39%	207.505.027.284,00
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	5.1.7	598.159.971.000,00	598.159.971.000,00	100,00%	596.801.161.000,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	5.1.8	189.966.356.000,00	149.857.598.813,00	78,89%	145.011.290.567,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN		1.126.560.008.268,00	1.076.802.235.591,00	95,58%	1.099.078.219.705,00
1.2.2.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
1.2.2.1.	Dana Penyesuaian	5.1.9	91.903.526.000,00	91.903.525.000,00	100,00%	71.400.280.000,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA		91.903.526.000,00	91.903.525.000,00	100,00%	71.400.280.000,00
1.2.3.	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA					
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.10	106.340.603.230,00	96.892.465.268,00	91,12%	96.084.898.713,81
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA		106.340.603.230,00	96.892.465.268,00	91,12%	96.084.898.713,81
1.2.4.	BANTUAN KEUANGAN					
1.2.4.1.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5.1.11	24.314.839.133,00	17.973.149.195,18	73,92%	31.121.265.700,52
	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		24.314.839.133,00	17.973.149.195,18	73,92%	31.121.265.700,52
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.349.118.976.631,00	1.283.571.375.054,18	95,14%	1.267.684.664.119,13
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
1.3.1.	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00%	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		0,00	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL PENDAPATAN		1.544.994.847.323,41	1.465.379.972.442,88	94,86%	1.404.762.616.079,71
2	BELANJA	4.4.2				
2.1.	BELANJA OPERASI					
2.1.1.	Belanja Pegawai	5.1.12	509.588.998.283,00	496.951.321.626,00	97,52%	542.776.821.927,81
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.1.13	541.529.499.973,12	482.010.326.818,07	89,01%	466.362.846.263,48
2.1.3.	Belanja Hibah	5.1.14	25.007.200.000,00	20.484.068.505,00	81,91%	18.046.412.500,00
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	5.1.15	2.962.760.000,00	2.372.380.000,00	80,07%	6.150.750.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI		1.079.088.448.256,12	1.001.818.096.949,07	92,84%	1.033.339.830.691,29
2.2.	BELANJA MODAL					
2.2.1.	Belanja Tanah	5.1.16	229.780.000,00	109.268.000,00	47,55%	142.857.100,00
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.17	47.259.501.204,50	42.821.306.694,51	90,81%	45.410.744.308,75
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.18	79.920.290.641,55	55.585.637.178,23	69,55%	105.001.750.997,66
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.19	160.829.424.519,34	136.344.121.813,28	84,78%	303.352.096.100,91
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.20	22.825.816.174,00	19.805.264.496,58	86,77%	776.680.500,00
	JUMLAH BELANJA MODAL		311.064.812.539,39	254.665.598.182,80	81,87%	454.684.129.007,32
2.3.	BELANJA TAK TERDUGA					
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	5.1.21	348.065.000,00	0,00	0,00%	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		348.065.000,00	0,00	0,00%	0,00
2.4.	TRANSFER	4.4.3				
2.4.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
2.4.2.1.	Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.22	177.403.526.000,00	177.089.974.300,00	99,82%	150.100.280.000,00
2.4.2.2.	Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik	5.1.23	1.091.218.554,00	1.091.218.554,00	100,00%	1.009.254.546,00
	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		178.494.744.554,00	178.181.192.854,00	99,82%	151.109.534.546,00
	JUMLAH TRANSFER		178.494.744.554,00	178.181.192.854,00	99,82%	151.109.534.546,00
	JUMLAH BELANJA + TRANSFER		1.568.996.070.349,51	1.434.664.887.985,67	91,44%	1.639.133.494.244,61
	SURPLUS/DEFISIT		(24.001.223.026,10)	30.715.084.457,21	-127,97%	(234.370.878.164,90)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

No	URAIAN	Catatan	Anggaran Setelah Perubahan 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN	4.4.4				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.1.1.	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	5.1.24	57.810.665.661,04	57.810.665.661,04	100,00%	292.051.268.825,94
3.1.2.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	5.1.25	0,00	49.500.000,00	100,00%	130.275.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		57.810.665.661,04	57.860.165.661,04	100,09%	292.181.543.825,94
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Pada BUMD	5.1.26	8.379.700.000,00	7.479.700.000,00	89,26%	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		8.379.700.000,00	7.479.700.000,00	89,26%	0,00
3.3.	PEMBIAYAAN BERSIH		49.430.965.661,04	50.380.465.661,04	101,92%	292.181.543.825,94
4	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.27	25.429.742.634,94	81.095.550.118,25	318,90%	57.810.665.661,04


 BUPATI PELALAWAN
 H.M. HARRIS



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.4 Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

No	URAIAN	Catatan	Anggaran Setelah Perubahan 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	4.4.1				
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1	56.100.940.000,00	66.868.071.579,90	119,19%	59.549.583.871,46
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.2	10.904.976.800,00	4.164.771.532,00	38,19%	9.152.961.577,00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.3	10.628.650.082,00	10.628.650.082,00	100,00%	11.262.105.502,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.4	55.923.895.725,41	55.036.407.556,96	98,41%	101.843.946.438,24
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		133.558.462.607,41	136.697.900.750,86	102,35%	181.808.597.388,70
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER					
1.2.1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.5	121.039.253.000,00	130.445.877.647,00	107,77%	112.262.698.776,00
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.6	172.507.609.644,00	199.938.435.166,00	115,90%	216.521.967.002,00
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	5.1.7	610.599.637.000,00	610.599.637.000,00	100,00%	598.159.971.000,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	5.1.8	169.518.518.000,00	147.794.646.899,00	87,18%	149.857.598.813,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN		1.073.665.017.644,00	1.088.778.596.712,00	101,41%	1.076.802.235.591,00
1.2.2.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
1.2.2.1.	Dana Penyesuaian	5.1.9	90.154.697.000,00	89.841.146.300,00	99,65%	91.903.525.000,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA		90.154.697.000,00	89.841.146.300,00	99,65%	91.903.525.000,00
1.2.3.	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA					
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.10	87.900.000.000,00	99.144.372.102,27	112,79%	96.892.465.268,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA		87.900.000.000,00	99.144.372.102,27	112,79%	96.892.465.268,00
1.2.4.	BANTUAN KEUANGAN					
1.2.4.1.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5.1.11	5.522.000.000,00	5.774.000.000,00	104,56%	17.973.149.195,18
	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		5.522.000.000,00	5.774.000.000,00	104,56%	17.973.149.195,18
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.257.241.714.644,00	1.283.538.115.114,27	102,09%	1.283.571.375.054,18
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
1.3.1.	Pendapatan Hibah	5.1.12	48.550.200.000,00	48.784.680.000,00	100,48%	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		48.550.200.000,00	48.784.680.000,00	100,48%	0,00
	TOTAL PENDAPATAN		1.439.350.377.251,41	1.469.020.695.865,13	102,06%	1.465.379.972.442,88
2	BELANJA	4.4.2				
2.1.	BELANJA OPERASI					
2.1.1.	Belanja Pegawai	5.1.13	523.204.241.583,00	497.085.155.748,00	95,01%	496.951.321.626,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.1.14	496.964.780.797,11	427.516.106.479,32	86,03%	482.010.326.818,07
2.1.3.	Belanja Hibah	5.1.15	9.925.500.000,00	8.836.155.000,00	89,02%	20.484.068.505,00
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	5.1.16	2.157.630.000,00	1.723.016.000,00	79,86%	2.372.380.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI		1.032.252.152.380,11	935.160.433.227,32	90,59%	1.001.818.096.949,07
2.2.	BELANJA MODAL					
2.2.1.	Belanja Tanah	5.1.17	6.822.050.000,00	0,00	0,00%	109.268.000,00
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.18	48.205.063.672,00	41.169.733.538,17	85,41%	42.821.306.694,51
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.19	52.813.114.417,67	37.732.098.968,40	71,44%	55.585.637.178,23
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.20	79.647.118.112,88	67.251.795.576,36	84,44%	136.344.121.813,28
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.21	15.587.779.382,00	15.127.607.276,78	97,05%	19.805.264.496,58
	JUMLAH BELANJA MODAL		203.075.125.584,55	161.281.235.359,71	79,42%	254.665.598.182,60
2.3.	BELANJA TAK TERDUGA					
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	5.1.22	94.845.912.371,00	0,00	0,00%	0,00
2.3.2.	Belanja Tak Terduga Bencana Alam	5.1.23	500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		95.345.912.371,00	0,00	0,00%	0,00
2.4.	TRANSFER	4.4.3				
2.4.1.	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
2.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.24	5.610.094.000,00	0,00	0,00%	0,00
2.4.1.2.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.25	1.090.497.680,00	0,00	0,00%	0,00
	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		6.700.591.680,00	0,00	0,00%	0,00
2.4.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
2.4.2.1.	Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.26	181.991.426.800,00	181.494.832.600,00	99,73%	177.089.974.300,00
2.4.2.2.	Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik	5.1.27	1.091.218.554,00	1.091.218.554,00	100,00%	1.091.218.554,00
	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		183.082.645.354,00	182.586.051.154,00	99,73%	178.181.192.854,00
	JUMLAH TRANSFER		189.783.237.034,00	182.586.051.154,00	96,21%	178.181.192.854,00
	JUMLAH BELANJA + TRANSFER		1.520.456.427.369,66	1.279.027.719.741,03	84,12%	1.434.664.887.985,67
	SURPLUS/DEFISIT		-81.106.050.118,25	189.992.976.124,10	(234,25%)	30.715.084.457,21

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak

Hak Cipta



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

No	URAIAN	Catatan	Anggaran Setelah Perubahan 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN	4.4.4				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.1.1.	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	5.1.28	81.095.550.118,25	81.627.364.395,25	100,66%	57.810.665.661,04
3.1.2.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	5.1.29	10.500.000,00	31.500.000,00	300,00%	49.500.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		81.106.050.118,25	81.658.864.395,25	100,68%	57.860.165.661,04
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Pada BUMD	5.1.30	0,00	0,00	0,00%	7.479.700.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00%	7.479.700.000,00
3.3.	PEMBIAYAAN BERSIH		81.106.050.118,25	81.658.864.395,25	100,68%	50.380.465.661,04
4	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.31	0,00	271.651.840.519,35	0,00%	81.095.550.118,25

BUPATI PELALAWAN

 H. M. HARRIS

icantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.5 Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
1	PENDAPATAN	1.585.727.281.643,15	1.648.568.828.804,04	103,96	1.469.020.695.865,13
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	155.158.906.702,15	159.841.016.342,31	103,02	136.697.900.750,86
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	72.226.500.000,00	83.493.723.962,94	115,60	66.868.071.579,90
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.867.375.000,00	4.918.332.699,09	45,26	4.164.771.532,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.110.000.000,00	10.792.997.309,00	97,15	10.628.650.082,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.955.031.702,15	60.635.962.371,28	99,48	55.036.407.556,96
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.366.700.074.941,00	1.481.831.812.461,73	108,42	1.277.764.115.114,27
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.133.633.414.941,00	1.219.439.285.252,00	107,57	1.088.778.596.712,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	100.018.054.400,00	114.857.204.500,00	114,84	130.445.877.647,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	178.628.154.400,00	274.998.204.440,00	153,95	199.938.435.166,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	645.243.179.000,00	645.243.179.000,00	100,00	610.599.637.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	209.744.027.141,00	184.340.697.312,00	87,89	147.794.646.899,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	139.466.660.000,00	138.973.880.800,00	99,65	89.841.146.300,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	139.466.660.000,00	138.973.880.800,00	99,65	89.841.146.300,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	93.600.000.000,00	123.418.646.409,73	131,86	99.144.372.102,27
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	93.600.000.000,00	123.418.646.409,73	131,86	99.144.372.102,27
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	63.868.300.000,00	6.896.000.000,00	10,80	54.558.680.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	56.644.300.000,00	0,00	0,00	48.784.680.000,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	7.224.000.000,00	6.896.000.000,00	95,46	5.774.000.000,00
2	BELANJA	1.766.766.659.103,50	1.467.422.412.991,21	83,06	1.279.027.719.741,03
2.1	BELANJA OPERASI	1.390.896.993.956,19	1.228.172.355.054,15	88,30	1.117.746.484.381,32
2.1.1	Belanja Pegawai	628.397.496.802,00	585.692.665.518,24	93,20	533.876.718.391,00
2.1.1.1	Belanja Pegawai BLUD	20.699.428.763,00	16.564.330.760,00	80,02	18.552.683.721,00
2.1.2	Belanja Barang	522.837.079.606,19	414.429.502.355,91	79,27	390.724.543.836,32
2.1.2.1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.914.091.254,00	15.270.313.625,00	80,74	13.542.601.858,00
2.1.5	Belanja Hibah	33.754.633.994,00	24.360.007.480,00	72,17	8.836.155.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.506.790.000,00	2.410.260.000,00	96,15	1.723.016.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	203.400.993.554,00	201.279.919.700,00	98,96	182.586.051.154,00
2.2	BELANJA MODAL	366.921.886.780,31	239.250.057.937,06	65,20	161.281.235.359,71
2.2.1	Belanja Tanah	4.850.478.500,00	1.816.539.100,00	37,45	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	78.826.523.505,00	52.640.860.274,67	66,78	41.169.733.538,17
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	94.005.364.136,50	75.202.773.789,71	80,00	37.732.098.968,40

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 2

in dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	165.061.791.988,81	107.913.712.722,68	65,38	67.251.795.576,36
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	24.177.728.650,00	1.676.172.050,00	6,93	15.127.607.276,78
2.3	BELANDA TAK TERDUGA	1.364.249.484,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.364.249.484,00	0,00	0,00	0,00
2.4	TRANSFER	7.583.528.883,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	7.583.528.883,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	6.496.791.383,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	1.086.737.500,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(181.039.377.460,35)	181.146.415.812,83	(100,06)	189.992.976.124,10
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	271.651.840.519,35	271.675.590.519,35	100,01	81.658.864.395,25
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	271.651.840.519,35	271.651.840.519,35	100,00	81.627.364.395,25
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	23.750.000,00	0,00	31.500.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	271.651.840.519,35	271.675.590.519,35	100,01	81.658.864.395,25
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	90.612.463.059,00	452.822.006.332,18	499,73	271.651.840.519,35

Pangkalan Kerinci, 17 Januari 2020

an. BUPATI PELALAWAN

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Selaku
Pejabat Pengelolaan Keuangan
Daerah



DEWITSYON SAHARUDDIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19721203 200012 1 004

1. Urut-urutan atau urutan karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Dhea Rezky Zulyana, di lahirkan di Pekanbaru 02 Juli 1999. Ayahanda bernama Zulfahmi dan Ibunda bernama Desiana. Penulis anak pertama dari dua bersaudara.

Jenjang Pendidikan dimulai dari TK Al-Munawaroh Kota Pekanbaru Tahun Ajaran 2004-2005, kemudian tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan di SDN 021 Kota Pekanbaru dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 25 Kota Pekanbaru dari tahun 2011-2014, dan melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Kota Pekanbaru Jurusan Adminitrasi Perkantoran dari 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D3 Akuntansi.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan Judul “ **Analisis Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan Periode 2015-2019 Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau** ” dibawah bimbingan Ibu Identiti, SE, M.Ak, Ak, CA dan pada tanggal 19 Mei 2020 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan nilai Sangat Memuaskan dan menyandang gelar Ahli Madya (AMd).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.